

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus- menerus dan berkesinambungan (Sutria, 2013). Pajak yang dipungut dari warga negara Indonesia adalah salah satu kewajiban yang penagihannya dapat dipaksakan. Salah satu pembiayaan dari sektor pajak adalah pembangunan jalan, pembiayaan kesehatan dan lain-lain. Pembangunan nasional Indonesia bukan hanya kewajiban pemerintah tapi juga kewajiban masyarakat semua, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional sangat diharapkan oleh pemerintah, masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan membayar pajak.

Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling Potensial. Menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) menyatakan bahwa : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, system wajib pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar pelaksanaan sistem self assessment dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (law enforcement) menjadi

hal yang sangat penting. Dalam sistem self assesment ini, peran aktif wajib pajak sangat diperlukan. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat diharapkan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak diharapkan akan terus meningkat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga harus dibarengi oleh peningkatan kinerja petugas pajak. Petugas harus memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih baik dan terus lebih baik lagi. Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. (Nindar *et al* 2014).

Untuk mengatasi perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target agar pembangunan nasional berjalan lancar, penulis bermaksud

menuangkannya ke dalam proposal dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng”**

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Adapun yang menjadi tujuan dari studi lapang itu adalah :

- 1 Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya gubeng telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Untuk menganalisis apa hambatan dan upaya yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya gubeng
- 3 Untuk menganalisis apakah penagihan pajak dengan surat paksa telah efektif dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Surabaya gubeng

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

1. Memperluas wawasan peneliti serta mempersiapkan peneliti dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya
2. .Untuk dapat dijadikan sumber informasi dan refrensi dalam penelitian sejenis.

## **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Dalam laporan praktik kerja lapang ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah;

1. Tata cara penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Gubeng
2. Faktor hambatan dan upaya yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya gubeng

### **1.5 METODE PENGUMPULAN DATA**

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode

1. Studi Kepustakaan

yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan data yang di kumpulkan ,diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi di internet

2. Observasi

yaitu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap masalah yang di teliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan - keterangan yang di peroleh secara nyata atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

3. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya gubeng

## 1.6 JADWAL STUDI LAPANG

- Jadwal Pelaksanaan Studi Lapang :  
1 Desember – 31 Desember 2017
- Tempat Studi Lapangan:  
KPP PRATAMA SURABAYA  
GUBENG  
Jl Sumatera No.22-24 Surabaya
- Peserta Pelaksana Praktek Kerja Lapangan  
Nama : Aristo Desmeizal  
NPM : 14.1.04.00921  
Program Studi : Diploma Tiga Manajemen Perpajakan  
Jurusan : Manajemen Perpajakan  
Alamat : Perum Pondok Sedati Asri, Sedati Sidoarjo  
Email : arisblack19@gmail.com  
No HP : 083857013484

